

BAB III

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN EVALUASI PEMANFAATAN
DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
SEKARPUTIH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada bab ini, diuraikan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian yang di dapat kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang digunakan berdasarkan definisi operasional pada bab sebelumnya. Dimana hasil dari penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana evaluasi pemanfaatan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2016 Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.

A. Evaluasi Konteks (*contex*)

Evaluasi program merupakan penggambaran dan spesifikasi mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi serta tujuan program. Evaluasi program sendiri membantu menentukan kebutuhan serta sasaran yang akan dicapai. Pada jenis evaluasi ini, guna mengukur tujuan pelaksanaan serta sasaran dari program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sekarputih pada tahun 2016 terhadap kondisi wilayah serta kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

a. Tujuan Pelaksanaan

Pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun 2016 murni berdasarkan usulan-usulan dari

masyarakat. Program pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan, mengingat Desa Sekarputih merupakan salah satu Desa yang merasakan dampak secara langsung dari adanya tambang galian tanah gamping. Permasalahan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan dokumen RPJMDesa adalah belum baiknya fasilitas jalan sebagai sarana penghubung, serta sebagai akses utama transportasi masyarakat. Maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur haruslah mengarah kepada pembangunan jalan yang rusak, pembangunan talud dan pengerasan jalan serta masih banyak jalan yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa Sekarputih yang disebabkan oleh truk muatan tambang tanah gamping.

Permasalahan yang ada sebagian besar sudah teratasi dengan adanya bantuan dana yang berasal dari Pemerintah, bantuan pihak ketiga dan swadaya dari masyarakat. Akan tetapi, masih ada beberapa jalan yang belum terjamah pembangunan, yang mana jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya akses masyarakat untuk beraktivitas setiap harinya. Sehingga masyarakat lebih memilih melewati jalan Desa lain guna beraktivitas sehari-sehari. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu mendapatkan perhatian lebih jika dibanding dengan kebutuhan yang lainnya. Berikut merupakan tabel gambaran dari keadaan wilayah Desa Sekarputih:

Tabel 3.1
Kondisi Wilayah Desa Sekarputih Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Kondisi Wilayah
1.	Bedegan	Dataran rendah, persawahan, sebagian jalan masih banyak yang bagus, pemukiman
2.	Sekarputih	Dataran rendah, pemukiman, sebagian jalan masih banyak yang rusak, industry kecil makanan lokal.
3.	Dadapan	Dataran rendah, pemukiman, sebagian jalan sudah bagus, industry kecil makanan lokal.
4.	Kenongorejo	Dataran rendah, pemukiman, sebagian jalan rusak, area persawahan
5.	Kebonagung	Dataran rendah, sebagian jalan bagus, pemukiman, area persawahan.

Sumber: Profil Desa Sekarputih

Berdasarkan tabel kondisi wilayah pada masing-masing Dusun di Desa Sekarputih diatas, dapat diketahui dengan jelas bagaimana kondisi atau keadaan yang ada di masing-masing Dusun. Mengingat wilayah Desa Sekarputih banyak jalan yang rusak dan merupakan akses satu-satunya untuk masyarakat sekitar, sehingga untuk beberapa wilayah perlu untuk melakukan pembangunan pavingisasi dengan tujuan memperlancar akses jalan sebagai penghubung antar dusun. Sebagian besar kondisi jalan yang ada di wilayah Desa Sekarputih baik itu jalan utama maupun penghubung antar Dusun masih banyak jalan rusak atau tidak layak untuk dilewati. Maka pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi tersebut ialah pembangunan pavingisasi jalan yang nantinya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

b. Sasaran pelaksanaan

Sebagian besar jenis pembangunan infrastruktur yang diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa Sekarputih untuk masing-masing Dusun memiliki kesamaan. Hal ini dikarenakan masing-masing Dusun mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang sama. Sehingga dengan adanya kesamaan kebutuhan serta permasalahan yang terdapat di setiap Dusun, memudahkan Pemerintah Desa dalam membentuk skala prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2016. Secara garis besar bentuk dari kesamaan permasalahan serta kebutuhan yang ada di setiap Dukuh ialah perbaikan jalan. Adapun program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun anggaran 2016 ialah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jenis Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Jenis Kegiatan
1.	Sekarputih	Pembangunan Pavingisasi RT 01-02
2.	Dadapan	Pembangunan Pavingisasi RT 03
		Pembanguna Makadam Jalan Usaha Tani
3.	Bedegan	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani
		Pembangunan TPT RT 01
4.	Kenongorejo	Pembangunan Pavingisasi RT 06
		Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani
5.	Kebonagung	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani

Sumber : Dokumen Laporan Ralisasi APBDes Sekarputih Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jenis-jenis pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sekarputih tidak dilaksanakan di satu titik saja, melainkan merata di masing-masing Dusun, yaitu di lima Dusun yang ada. Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa pembangunan infrastuktur Desa Sekarputih di dominasi oleh pembangunan

pavingisasi dan makadam jalan. Adanya kesamaan pembangunan infrastruktur tersebut didasari oleh fasilitas yang terdapat di wilayah Desa Sekarputih kurang memadai serta kurnag layak. Sehingga pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan yang memang perlu dilaksanakan. Pembangunan pavingisasi jalan berdasarkan keadaan jalan yang memang kurang layak untuk dilewati mengingat jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat guna melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan bapak Naerwoto selaku kepala Dusun Dadapan, bahwa:

“Jalan satu-satunya yang biasanya digunakan masyarakat kan memang sudah rusak parah, makanya diperbaiki dengan pavingisasi. Jadi masyarakat tidak susah lagi beraktivitas setelah jalannya diperbaiki. Pembangunan ini pun juga selain dari usulan warga juga lihat dari kondisinya sendiri juga sudah tidak layak, jd dengan kata lain pas dengan apa yang warga mau” (Wawancara 26 Juni 2018)

Selanjutnya pembangunan infrastruktur berupa pembangunan makadam jalan usaha tani juga tidak dilaksanakan disatu titik saja, melainkan di empat titik yang diantaranya di Dusun Dadapan, Dusun Bedegan, Dusun Kenongorejo, dan Dusun Kebonagung. Pembangunan makadam jalan usaha tani sendiri berfungsi untuk akses jalan dari pemukiman warga menuju area persawahan. Adanya pembangunan berupa makadam jalan usaha tani didasari oleh para petani yang kesulitan mengakses jalan untuk kegiatan transaksi pertanian maupun untuk menuju kearea persawahan, sehingga dapat menghambat proses kegiatan pertanian. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa program pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih tahun 2016 telah sesuai dengan kebutuhan serta keadaan wilayah masing-masing Dusun. Berikut tabel mengenai keadaan wilayah serta jenis pembangunan infastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 berdasarkan Dusun:

Tabel 3.3
Gambaran Wilayah dan Jenis Pembangunan Infrastruktur

No.	Dusun	Gambaran Wilayah	Jenis Pemabngunan
1.	Bedegan	Dataran rendah, persawahan, sebagian jalan sudah banyak yang bagus, pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangun Makadam Jalan Usaha Tani • Pembangunan TPT RT 01
2.	Sekarputih	Dataran rendah, pemukiman, sebagian jalan masih banyak yang rusak, industry kecil makanan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pavingisasi RT 01-02
3.	Dadapan	Dataran rendah, pemukiman, sebagian jalan masih banyak yang rusak, industry kecil makanan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pavingisasi RT 03 • Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani
4.	Kenongorejo	Dataran rendah, pemukiman, sebagian jalan rusak, area persawahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pavingisasi RT 06 • Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani
5.	Kebonagung	Dataran rendah, sebagian jalan sudah bagus, pemukiman, area persawahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani

Sumber: Profil Desa Sekarputih dan APBDes Desa Sekarputih Tahun 2016.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan kebutuhan serta keadaan wilayah disetiap masing-masing Dusun. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan merupakan murni usulan dari masyarakat setempat. Dengan adanya pemerataan dalam pembangunan

infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di setiap Dusun yang diharapkan dapat mengurangi adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

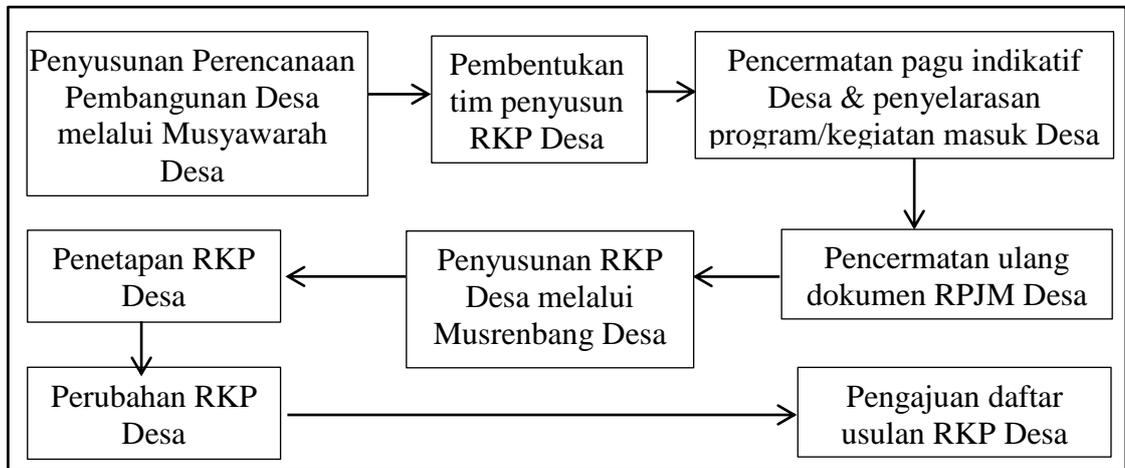
B. Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan berguna untuk membantu mengatur sebuah keputusan, mengatur rencana serta strategi untuk mencapai kebutuhan. Evaluasi masukan dikaitkan dengan kepraktisan, pembiayaan dan efektivitas. Sehingga dalam evaluasi ini lebih membahas mengenai masalah dana atau anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016.

a. Dana pelaksanaan program pembangunan infrastruktur

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan suatu konsep yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaannya program-program yang telah disepakati melalui Musrenbang Desa, yang terdiri dari Pemerintah Desa Sekarputih, BPD, Kepala Dusun serta Tokoh masyarakat lainnya yang dimuat dalam dokumen RKPDes Sekarputih. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ialah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Alur Penyusunan RKP Desa



Jumlah anggaran pendapatan Desa yang terdapat di APBDes, baik itu Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun Pendapatan Transfer sangatlah minim dan terbatas. Sehingga dalam pembentukan dokumen RKPDes haruslah mengacu pada anggaran yang diterima oleh Desa. Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun anggaran 2016 menerima Dana Desa sebesar Rp 692.733.000,-. Dana Desa tersebut tidaklah 100% langsung diterima oleh Pemerintah Desa Sekarputih melainkan secara bertahap, seperti yang disampaikan oleh bapak Suhadi sebagai Kasi Pembangunan sebagai berikut:

“Itu dalam penerimaan Dana Desa yang kita terima tahun 2016 tidak langsung 100% dicairkan, tapi dibagi jadi dua tahap yakni pertama bulan Juli 60% terus kedua sisanya 40% di bulan Desember. Tahun 2016 itu memang dana yang diterima Desa lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa hampir 800an, tp ya tidak apa-apa toh pembangunan di tahun ini (2016) cukup sedikit” (Wawancara 26 Juni 2018)

Adapun rincian dari tahapan penerimaan Dana Desa dari Pemerintah Desa Sekarputih tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tahapan Penerimaan Dana Desa Sekarputih Tahun 2016

No.	Tahap Ke	Bulan	Besaran (%)	Besaran (Rp)
1.	Tahap Ke-1	13 Juli 2016	60%	415.639.800,-
2.	Tahap Ke-2	28Desember 2016	40%	277.093.200,-
Jumlah			100%	692.733.000,-

Sumber: Arsip Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sekarputih tahun 2016

Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih tidak hanya berasal dari Dana Desa melainkan terdiri dari pendapatan asli Desa, pendapatan Transfer serta pendapatan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Adapun total pendapatan Desa Sekarputih pada tahun 2016 akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
APPBDes Desa Sekarputih Tahun Anggaran 2016

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Ket.
1.	Pendapatan		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	208.000.000,-	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.447.137.200,-	
1.2.1.	Dana Desa	692.733.000,-	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	25.372.200,-	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	729.032.000,-	
1.3.	Pendapatan Lain-Lain	17.131.700,-	
Jumlah Pendapatan		1.838.468.900,-	

Sumber: APBDes DesaSekarputih Tahun anggaran 2016

Berdasarkan jumlah dari total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa Sekarputih tentunya tidak sepenuhnya digunakan untuk bidang pembangunan Desa, akan tetapi terbagi menjadi dua bagian, yakni 65% untuk pemberdayaan masyarakat dan 35% sisanya digunakan untuk belanja yang berkaitan dengan perangkat Desa dan kegiatan operasional.

Dengan begitu, berikut merupakan program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun 2016:

Tabel 3.6
Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1.	Pembangunan Pavingisasi	Dadapan Rt. 03	321.116.500,-
2.	Pembangunan Pavingisasi	Sekarputih Rt.01-02	321.116.500,-
3.	Pembangunan Pavingisasi	Kenongorejo Rt. 06	800.000.000 ,-
4.	Pembangunan Pavingisasi	Kebonagung	700.000.000,-
5.	Pembangunan Talut Penahan Tanah (TPT)	Bedegan Rt. 01	140.000.000,-
6.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Dadapan	70.000.000,-
7.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Kenongorejo	70.000.000,-
8.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Bedegan	70.000.000,-
Jumlah			2.492.233.000,-

Sumber: RPKDes Desa Sekarputih Tahun 2016

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat dilihat program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih tahun anggaran 2016. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih tidaklah hanya berpusat di satu titik saja, melainkan merata di seluruh titik di setiap wilayah Desa. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 dapat dikatakan telah sesuai dengan keadaan wilayah serta kebutuhan di masing-masing Dusun. Disamping itu, dengan adanya pemerataan pembangunan minimal satu program di setiap

wilayah, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

b. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program

Di dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Sumber daya manusia itu sendiri ialah para pekerja yang membantu dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam proses pengadaan tenaga kerja pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih tahun 2016 dilaksanakan dengan menggunakan jasa buruh dengan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK). Hal tersebut di dasari oleh aktivitas masyarakat Desa Sekarputih yang mayoritas seorang petani dan buruh tani yang mana saat pelaksanaan pembangunan berdampingan dengan musim tanam padi, sehingga banyak masyarakat lebih memilih bercocok tanam daripada membantu dalam proses pembangunan. Sehingga hal ini lah yang menjadi latar belakang dari kurangnya tenaga masyarakat untuk turun serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih. Dalam perekrutan tenaga kerja Pemerintah Desa menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar Desa Sekarputih. Para pekerja tersebut di dapatkan dari rekomendasi masyarakat yang menyadari akan pentingnya para pekerja dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih, akan tetapi masyarakat sekitar Desa Sekarputih sendiri tidak dapat terjun secara langsung dalam proses pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni bapak Suhadi selaku Kasi Pembangunan, bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 itu memakai jasa buruh dengan dibantu ada beberapa dari warga yang bisa saja. Tapi tetap sebgiaan penuh pakai buruh, dan itu buruhnya di dapat dari usulan warga sekitar soalnya warga disini kan petani nggak punya waktu luang kalau sudah musim tanam. Jadi ya, siapa yang bisa saja bantu kalau nggak bisa yaa tidak apa-apa mereka (warga) ada kerjaan juga”. (Wawancara 26 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa memang dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih mengalami kesulitan apabila hanya mengandalkan dari bantuan masyarakat setempat tanpa bantuan dari pekerja luar. Hal ini latar belakang oleh kesibukan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya sebagai seorang petani, sehingga mereka lebih memilih bercocok tanam dari pada bergotong-royong dalam melaksanakan pembangunan Desa. hal tersebut dibenarkan oleh informan lain, yakni bapak Narwoto selaku Kepala Dusun sebagai berikut:

“Di Desa sini (Sekarputih) memang sedikit susah ya kalau warganya harus turun tangan secara langsung di proses pembangunan Desa. Yaa karna karna faktor utamanya warga disini kalau sudah masuk musim tanam atau panen pasti di sawah semua dan itu setiap hari. Jadi pasti pakai tenaga dari luar kalau ada pembangunan seperti ini”. (Wawancara 27 Juni 2018)

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur menggunakan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK) dirasa sangat tepat, melihat Pemerintah Desa Sekarputih menggunakan sistem upah HOK semata-mata hanya agar kegiatan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Berikut data dari jumlah tenaga pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jenis Kegiatan, Lokasi, Pekerja, Biaya Upah dan Anggaran

No.	Jenis Kegiatan	Dusun	Jumlah Pekerja			Anggaran Pekerja	Anggaran Kegiatan
			P	T	M		
1.	Pembangunan Pavingisasi	Dadapan RT.03	13	4	-	52.500.000,-	321.116.500,-
2.	Pembangunan Pavingisasi	Sekarputih RT.01-02	15	6	-	52.500.000,-	321.116.500,-
3.	Pembangunan Pavingisasi	Kenongorejo RT.06	13	4	-	60.000.000,-	800.000.000,-
4.	Pembangunan Pavingisasi	Kebonagung	10	3	-	42.300.000,-	700.000.000,-
5.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Dadapan	5	2	-	35.000.000,-	70.000.000,-
6.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Kenongorejo	7	3	-	35.000.000,-	70.000.000,-
7.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Bedegan	4	1	-	35.000.000,-	70.000.000,-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT)	Bedegan RT.01	10	3	-	17.235.000,-	140.000.000,-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Sekarputih Tahun 2106

Ket: P=Pekerja, T=Tukang dan m=Mandor.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui jumlah pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016, beserta dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk upah pekerja yang disesuaikan dengan volume pembangunan serta waktu penyelesaian dari masing-masing program kegiatan. Banyak serta sedikitnya jumlah pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada lamanya waktu penyelesaian serta menimbulkan pembengkakan biaya upah pekerja. Semakin lamanya pengerjaan pembangunan infrastruktur secara langsung akan berimbas pula terhadap

biaya upah untuk pekerja, yang mana sistem upah Hari Orang Pekerja (HOK) dihitung berdasarkan hari.

C. Evaluasi Proses (*Process*)

Evaluasi proses merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi serta menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa telah diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 52-83), yang mana terdapat dua tahapan pelaksanaan pembangunan Desa yang diantaranya yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan tersebut diataranya ialah:

1. Penetapan Pelaksanaan Kegiatan, yaitu Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen RKPDes dan telah ditetapkan dalam APBDes. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
2. Penyusunan Rencana Kerja, yakni pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa yang di dalamnya memuat uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksanaan kegiatan.
3. Sosialisasi Kegiatan, yaitu Kepala Desa menginformasikan dokumen RKPDes, APBDes dan Rencana Kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan dengan cara musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, Musyawarah Dusun, Musyawarah kelompok, sistem informasi Desa

berbasis *website*, papan informasi Desa serta media lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa.

4. Pembekalan Pelaksanaan Kegiatan, yakni Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan kegiatan di Desa bersama Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembekalan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara pembimbingan teknis bersama Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pembekalan yang dimaksud yakni meliputi cara pengelolaan keuangan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.
5. Penyiapan Dokumen Administrasi, ialah pelaksanaa kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa.
6. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material, ialah pelaksanaan kegiatan pembangunanDesa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat. Selanjutnya besaran upah yang tercantum dalam dokumen RKPDes yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, meliputi:

1. Rapat kerja Pelaksana Kegiatan, yakni Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan terkait dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahapan mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2. Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa, ialah Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahapan perkembangan da akhir dari kegiatan infrastruktur Desa. Pada pemeriksaan tersebut dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur Desa sesuai dengan dokumen RKPDes.
3. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan, ialah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
4. Pengelolaan Pengaduan dan penyelesaian Masalah, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yakni pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Pada penyampaian laporan tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Selanjutnya laporan kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Selanjutnya laporan

kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan.

6. Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pertanggungjawaban diselenggarakan di setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
7. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa diatas, maka pada evaluasi proses pembangunan kali ini akan mengukur serta membandingkan pelaksanaan pembangunana yang ada di Desa Sekarputih dengan pedoman pembangunan Desa diatas. Pada evaluasi ini faktor-faktor yang dinilai yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kemudian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana beserta hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan pedoman pembangunan Desa beserta target yang telah ditetapkan dalam rancangan atau tidak.

a. Pelaksanaan Program Dana Desa

Pada pembahasan kali ini yang dimaksud dengan pelaksanaan program tentunya tidak lepas dengan adanya rencana pelaksanaan program. Dalam rencana pelaksanaan program terdapat adanya tahap persiapan yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Sekarputih sebelum pelaksanaan pembangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dengan begitu nantinya dapat diketahui dengan jelas bagaimana tahap persiapan Pemerintah Desa Sekarputih sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa tahun anggaran 2016.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sekarputih, tentu sebelumnya telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2016. Proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan dari inisiatif Pemerintah Desa (*Top Down Planning*). Dengan kata lain semua program kegiatan ialah hasil dari inisiatif Pemerintah Desa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) namun dengan catatan tetap mengedepankan apa yang menjadi usulan dari masyarakat setempat.

Setelah rencana kerja terbentuk selanjutnya diadakan pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), kemudian selaku Kepala Desa yakni bapak Sukiman menetapkan bapak Bambang sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibantu oleh masing-masing Kepala Dusun

melaksanakan pembangunan infrastruktur. Dengan terbentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selanjutnya tim tersebut menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa yang di dalamnya memuat uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksana, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja serta daftar pelaksana kegiatan. Hal ini sesuai dengan pemaparan bapak Suhadi selaku Kasi Pembangunan sebagai informan, bahwa:

“Sebelumnya kan dibentuk dulu tim pengelolanya (TPK) sama-sama Kades setelah semua tim terbentuk beserta anggotanya terus langsung menyusun rencana kerja. Rencana kerja ini salah satu isinya menetapkan berapa lama pelaksanaan (pembangunan). Kalau ngga seperti itu nanti bisa-bisa pelaksanaannya lama terus makan biaya banyak, orang itu sistemnya pakai sistem HOK yang dihitung harian.” (Wawancara 26 Juni 2018)

Target kegiatan pembangunan infrastruktur telah disusun di dalam rencana kerja yang di dalamnya telah memuat uraian kegiatan berupa biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja serta daftar pelaksana kegiatan. Dengan adanya target pembangunan yang jelas masyarakat selaku pekerja dalam pembangunan infrastruktur Desa dapat mengetahui tahapan-tahapan yang harus dicapai setiap harinya, guna dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur selesai sesuai dengan rencana kerja. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Suhadi selaku Kasi Pembangunan Desa Sekarputih yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, bahwa Pemerintah Desa harus menetapkan target pelaksanaan.

Penetapan target merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Disamping itu, penetapan target sangat perlu guna mengontrol target waktu penyelesaian. Dimana dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan sistem upah yang dihitung harian, maka dalam penyelesaian haruslah sesuai dengan target yang tercantum dalam rencana pelaksana, jika tidak maka akan berdampak pada membengkaknya biaya upah pekerja. Adapun target pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jenis Kegiatan, Lokasi, Volume dan Waktu Penyelesaian

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target Volume	Target Waktu Penyelesaian
1.	Pembangunan Pavingisasi	Dadapan RT 03	1750 M	1 Bulan
2.	Pembangunan Pavingisasi	Sekarputih RT 01-02	1750 M	1 Bulan
3.	Pembangunan Pavingisasi	Kenongorejo RT 06	1500 M	2 Bulan
4.	Pembangunan Pavingisasi	Kebonagung	1100 M	2 Bulan
5.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Dadapan	1000 M	2 Bulan
6.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Kenongorejo	1000 M	2 Bulan
7.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Bedegan	1000 M	2 Bulan
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT)	Bedegan RT 01	-	1 Bulan

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui besaran volume serta target waktu penyelesaian dan masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur Desa tahun 2016. Kinerja masyarakat Desa Sekarputih yang sebagai pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dapat diukur melalui target kinerja hariannya. Target kinerja harian diartikan sebagai target atau capaian dari masing-masing kegiatan

pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan dalam kurun waktu satu hari. Target kinerja harian memuat besaran volume pembangunan yang akan diselesaikan, sehingga untuk penyelesaian kegiatan pembangunan secara keseluruhan akan sesuai dengan target waktu penyelesaian. Sedangkan proses penetapan target waktu penyelesaian kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih pada tabel diatas diukur berdasarkan volume dari masing-masing kegiatan serta jumlah pekerja pelaksana kegiatan.

Pada pelaksanaannya tentu saja kinerja para pekerja tidak luput dari pantauan, maka disinilah fungsi adanya tukang untuk mengontrol proses pengerjaan pembangunan agar tidak menyimpang dari target yang telah ditentukan. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun anggaran 2016 terdapat 3 (tiga) macam pembangunan, yang diantaranya ialah pembangunan pavingisasi jalan, pembangunan makadam jalan usaha tani dan pembangunan talud penahan tanah (TPT). Berikut merupakan data realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

Tabel 3.9
Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2016

Lokasi	Jumlah Pekerja			Target Volume	Realisasi Volume	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
	P	T	M				
Realisasi Pembangunan Pavingisasi							
Dadapan Rt.03	13	4	-	1750 M	1750 M	1 Bulan	1 Bulan
Sekarputih Rt.01-02	15	6	-	1750 M	1750 M	1 Bulan	1 Bulan
Kenongorejo Rt.06	13	4	-	1500 M	1500 M	2 Bulan	2 Bulan
Kebonagung	10	3	-	1100 M	1100 M	2 Bulan	2 Bulan
Realisasi Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT)							
Bedegan Rt.01	10	3	-	-	-	1 Bulan	1 Bulan
Realisasi Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani							
Dadapan	5	2	-	1000 M	1000 M	2 Bulan	2 bulan
Kenongorejo	7	3	-	1000 M	1000 M	2 Bulan	2 Bulan
Bedegan	4	1	-	1000 M	1000 M	2 Bulan	2 Bulan

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Sekarputih Tahun 2016.

Berdasarkan data realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, para pekerja mampu menyelesaikan pembangunan dengan baik walaupun para pekerja tersebut bukan para pekerja ahli.

Gambar 3.2

Kondisi jalan sesudah pembangunan infrastruktur



sumber:Dok.Pribadi

Lama dalam penyelesaian pembangunan tersebut memang terbilang cukup lama mengingat hanya mengandalkan para pekerja dengan sistem upah HOK saja tanpa ada masyarakat ikut serta di dalamnya. Pelaksanaan pembangunan dengan sistem upah memang kurang efektif terhadap waktu dikarenakan penyelesaiannya memakan waktu yang relatif lebih lama, sehingga akan berdampak terhadap membengkaknya biaya yang dikeluarkan untuk para pekerja. Berikut data realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 akan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016

Lokasi	Target Biaya Upah	Realisasi Biaya Upah	Target Anggaran Kegiatan	Realisasi Anggaran Kegiatan
Realisasi Anggaran Pembangunan Pavingisasi				
Dadapan Rt.03	52.500.000,-	52.500.000,-	321.116.500,-	321.116.500,-
Sekarputi Rt.01-02	52.500.000,-	52.500.000,-	321.116.500,-	321.116.500,-
Kenongorejo Rt.06	60.000.000,-	60.000.000,-	800.000.000,-	800.000.000,-
Kebonagung	42.300.000,-	42.300.000,-	700.000.000,-	700.000.000,-
Realisasi Anggaran Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT)				
Bedegan Rt.01	17.235.000,-	17.235.000,-	140.000.000,-	140.000.000,-
Realisasi Anggaran Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani				
Dadapan	35.000.000,-	35.000.000,-	70.000.000,-	70.000.000,-
Kenongorejo				
Bedegan				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Sekarputih Tahun 2016

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pembangunan infrastruktur di atas dapat diketahui berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk upah pekerja beserta realisasinya. Anggaran tersebut dapat membengkak apabila dalam pelaksanaan pembangunan tetap menggunakan para pekerja harian tidak melibatkan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya para Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tetap melakukan pengawasan sebagai bentuk dari monitoring pelaksanaan pembangunan. Disamping itu, dalam pelaksanaan pembangunan para Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tetap mendapat kontrol dari Kepala Desa yakni berupa rapat kerja pelaksana kegiatan. Seperti apa yang dipaparkan oleh salah satu informan yakni bapak Suhadi selaku Kasi Pembangunan sebagai berikut:

“Jadi memang selama pelaksanaan pembangunan, TPK itu tidak dilepaas begitu saja, tetap ada pengawasan terutama dari Kepala Desa. Di pertengahan kita juga ada rapat evaluasi dan di akhir pelaksanaan ada rapat pembuatan laporan kegiatan”. (Wawancara 26 Juni 2018).

Gambar 3.3
Kondisi jalan setelah pembangunan pavingisasi



Sumber: Dok.Pribadi

b. Hambatan dalam pelaksanaan program

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tentunya tidak lepas akan adanya hambatan yang terjadi selama proses pengerjaannya. Sesuai apa yang di jelaskan oleh bapak Suhadi selaku Kasi Pembangunan sebagai berikut:

“Waktu pelaksanaan pembangunan itu ya jelas ada hambatannya, tidak mungkin tidak ada. Hambatannya paling dari segi cuaca ya, karena waktu itu pembangunan memasuki waktu penghujan, jadi yaa sering terganggu kalo tiba-tiba turun hujan. Kalau sudah gitu ya mau tidak mau ngga bisa dilanjutkan lagi, dan besoknya ngulang lagi bekas yang terkena hujan”. (Wawancara 26 Juni 2018)

Berdasarkan keterangan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pengerjaan pembangunan terdapat adanya kendala yakni cuaca yang tidak mendukung seperti halnya hujan. Mengingat saat proses

pembangunan berlangsung memasuki musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Sehingga saat terjadi hujan secara tiba-tiba, maka proses pengerjaan harus dihentikan sementara sampai hujan reda. Hal tersebut juga berlaku apabila hujan turun saat malam harinya, kemudian saat pagi hari para pekerja harus mengulang beberapa bagian dikarenakan hancur terkena hujan. Dengan kendala tersebut mengakibatkan dalam penyelesaian pembangunan sedikit terhambat sehingga dapat merugikan Pemerintah Desa.

Selain dari faktor cuaca yang menjadi kendala saat pelaksanaan pembangunan, terdapat faktor lain yakni sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah para pekerja yang membantu dalam proses pembangunan berlangsung. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih dikarenakan aktivitas dari masyarakat setempat yang mayoritas mata pencaharian mereka sebagai seorang petani dan buruh tani. Dengan tingginya aktivitas masyarakat di area persawahan sudah menyita waktu mereka dalam sehari-hari sehingga tidak dapat ikut terjun secara langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut disadari penuh oleh Pemerintah Desa Sekarputih bahwa masyarakat setempat akan lebih memilih menjalani aktivitas mereka sehari-hari yakni bercocok tanam dari pada ikut terjun langsung dalam proses pembangunan Desa. Maka pemerintah Desa mencari jalan keluar tersebut dengan cara menggunakan pekerja dari luar dengan menggunakan sistem upah perhari. Dengan adanya tenaga kerja dari luar tersebut proses pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan

oleh Pemerintah Desa Sekarputih berjalan dengan lancar hingga pembangunan selesai tepat waktu sesuai dengan rencana.

Berdasarkan apa yang telah di dapat dilapangan serta telah diuraikan seperti halnya diatas, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 dapat dikatakan telah sesuai target dari rencana kerja yang ada. Adapun kendala dalam pelaksanaan pembangunan yakni curah hujan yang tinggi, mengingat saat proses pelaksanaan pembangunan memasuki musim penghujan. Serta kurangnya sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat lebih memilih bercocok tanam dari pada ikut terjun langsung dalam proses pembangunan. Akan tetapi dengan kendala yang ada tidak menjadi hambatan yang sulit terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

D. Evaluasi Produk

Mengukur keberhasilan dalam pencapaian pembangunan infrastruktur Desa tidak hanya dilihat dari hasil yang tepat sasaran, melainkan dilihat dari hasil pembangunan itu sendiri dapat diteruskan, berjangka waktu yang panjang atau bahkan dihentikan. Maka dalam pembahasan kali ini bertujuan guna melihat dampak yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016.

a. Dampak Pelaksanaan Program Dana Desa

Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Desa Sekarputih tahun 2016 membawa dampak serta manfaat secara langsung

terhadap kehidupan sosial ekonomi di masyarakat, mengingat infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain apabila tidak adanya infrastruktur yang layak, maka tidak akan ada mobilitas sosial serta pertukaran dalam hal ekonomi. Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya kelancaran arus lalu lintas, angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan Dusun satu ke Dusun lainnya. Kemudian akan mendorong meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya disektor pertanian, industri kecil rumahan, perdagangan serta jasa. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yakni bapak Narwoto selaku Kepala Dusun Dadapan mengatakan bahwa:

“Pembangunan tahun kemarin (2016) memang semuanya pembangunan jalan dan semuanya atas usulan masyarakat juga, jadi adanya pembangunan itu sangat membantu sekali untuk masyarakat. Yang biasanya warga harus balik arah cari jalan desa lain, ini (jalan) selesai ya sangat terbantu sekali. Warga yang mau ke pasar mudah, akses jalan ke sawah buat petani juga gampang karena adanya pembangunan *makadam* jalan usaha tani, terus adik-adik yang mau sekolah juga gampang tidak mutar lewat desa lain” (Wawancara 26 Juni 2018)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun 2016 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur masyarakat lebih mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti halnya melakukan aktivitas perdagangan ke pasar serta aktivitas pertanian. Walaupun hasil dari pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, apabila tidak disertai dengan pemeliharaan yang tepat maka akan mengalami kerusakan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat pembangunan infrastruktur tersebut hasil dari permintaan masyarakat setempat. Dengan catatan pemerintah Desa beserta masyarakat haruslah mulai memikirkan bagaimana pemeliharaan terhadap pembangunan infrastruktur yang telah ada.